

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA PADA KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

**HARAPAN PRATAMA PUTRA NDRURU
178330094**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/21

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA PADA KECAMATAN PANCUR BATU
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi
Universitas Medan Area

Oleh :

**HARAPAN PRATAMA PUTRA NDRURU
178330094**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
Nama : **HARAPAN PRATAMA PUTRA NDRURU**
NPM : 17.833.0094
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

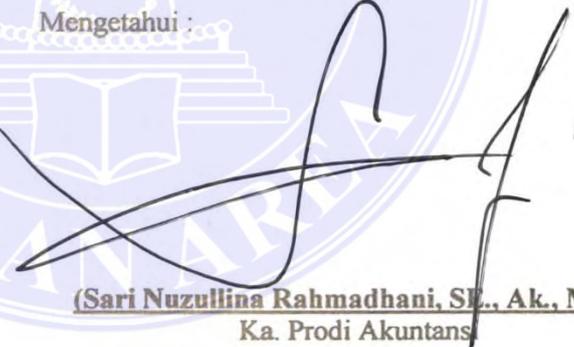

(Drs. Ali Usman Siregar, M.Si)

Pembimbing

Mengetahui :


(Dr. Ahsan Effendi, M.Si)

Dekan


(Sari Nuzullina Rahmadhani, S.E., Ak., M.Acc)

Ka. Prodi Akuntansi

14/06/21

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 14/Juni/2021

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”**, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan,



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METRAN
210F7AJX463509962

Harapan Pratama Putra Ndruru
NPM. 17.833.0094

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harapan Pratama Putra Ndruru
NPM : 17.833.0094
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

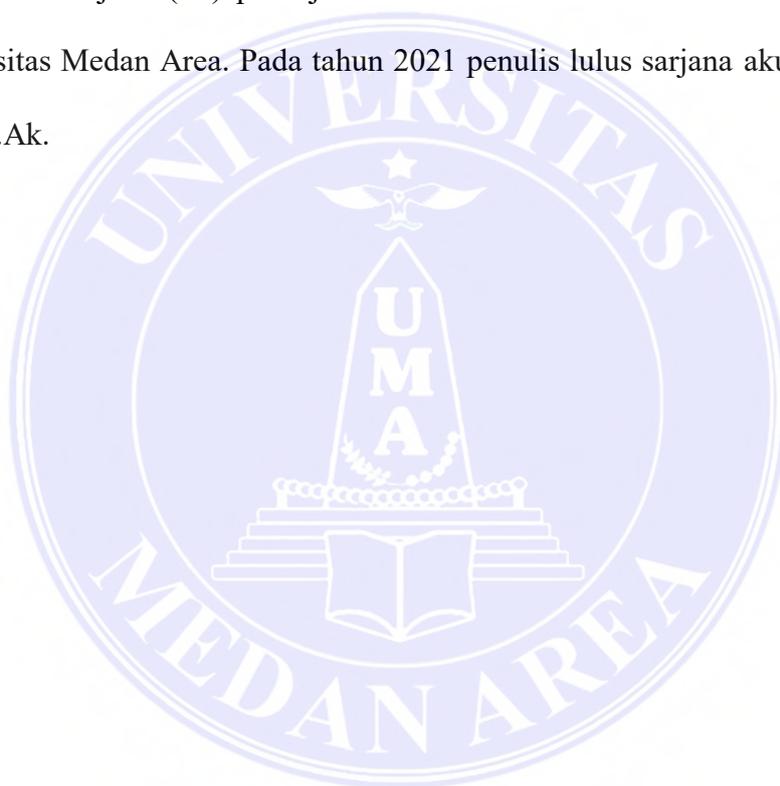
Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 14 Juni 2021
Yang menyatakan,



Harapan Pratama Putra Ndruru
NPM. 17.833.0094

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sisarahili, Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Januari 1998 dari ayah Taorisi Ndruru dan Ibu Lisahati Amazihono. Penulis adalah anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara. Pada tahun 2017 penulis lulus di SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro dan melanjutkan pendidikan sarjana (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area. Pada tahun 2021 penulis lulus sarjana akuntansi dengan gelar S.Ak.



ABSTRAK

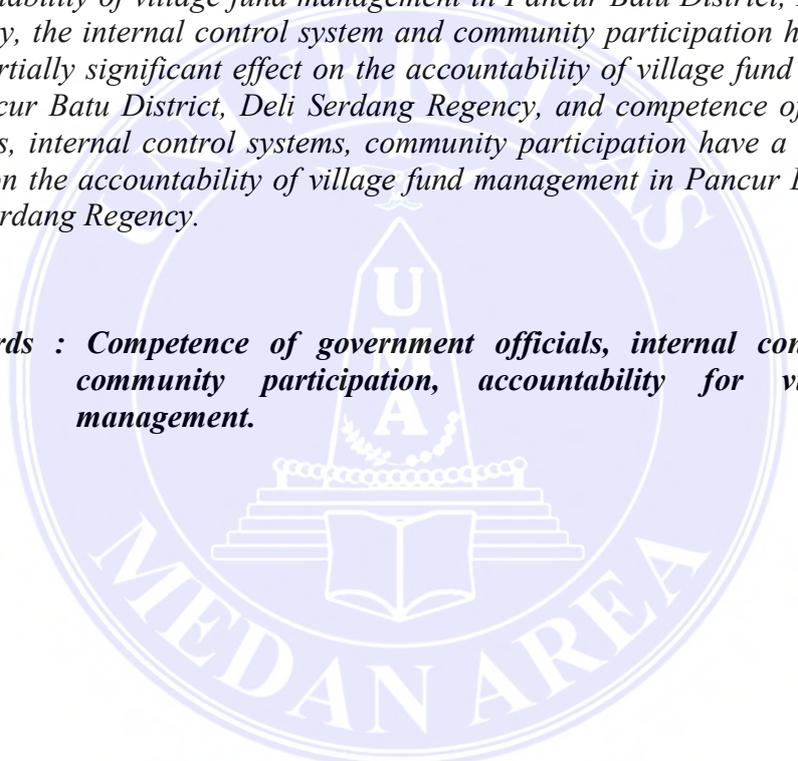
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Sampel yang digunakan didalam peneltian ini adalah 75 (orang) perangkat desa dikecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner (angket). Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparat pemerintah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dan kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci : Kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the competence of government officials, internal control systems, and community participation on the accountability of village fund management in Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. This research uses associative research type. The sample used in this research is 75 (people) village officials in the Pancur Batu district, Deli Serdang Regency. The sampling technique used is the purposive sampling technique. The type of data used is quantitative data with the data source is primary data. The data collection technique is using a questionnaire (questionnaire). Furthermore, the data analysis techniques used are data quality test, classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing. The results showed that the competence of government officials did not have a significant partial effect on the accountability of village fund management in Pancur Batu District, Deli Serdang Regency, the internal control system and community participation had a positive and partially significant effect on the accountability of village fund management in Pancur Batu District, Deli Serdang Regency, and competence of government officials, internal control systems, community participation have a simultaneous effect on the accountability of village fund management in Pancur Batu District, Deli Serdang Regency.

Keywords : *Competence of government officials, internal control system, community participation, accountability for village fund management.*



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur peneliti panjatkan atas berkat dan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang penulis rasa, dimana berkat, kasih dan pertolongan dariNya yang selalu menyertai peneliti sejak awal hingga akhir baik dalam kuliah dan terlebih pada penulisan skripsi berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang” dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini guna sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Peneliti menyadari banyak kekurangan bahkan kesalahan baik dalam segi bentuk, isi, dan tatabahasa. oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dalam menyempurnakan skripsi ini.

Peneliti juga sadar banyak tantangan dan hambatan serta kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung memudahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini. Sehingga peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Bapak (Taorisi Ndruru) dan Ibu (Lisahati Amazihono) yang saya sayangi dan cintai, sebagai orang terdepan untuk memberikan dukungan baik moril dan materil bagi peneliti
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Sari Nuzullina Ramadhani, SE., Ak., M.Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini

6. Ibu Linda Lores, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak. selaku Sekretaris Pembimbing yang telah memberikan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
9. Kepada Pimpinan serta seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian atau riset ditempat.
10. Sahabat : Kak Maslina Lubis, Muhammad Igbal, dan Saeful Maulana serta teman-teman lainnya yang bersama-sama berjuang untuk mendapat ilmu di Universitas Medan Area.
11. Untuk saudara peneliti, kakak Tati Nurdebora Ndr, Teti Prillestari Ndr, dan Adek Hendara Kekasih Ndr yang juga memberikan dukungan kepada peneliti.
12. Terakhir peneliti mengucapkan terimakasih teruntuk orang terkasih dan tercinta yang selalu memberi semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dapat terselesaikan, akhir kata peneliti harapan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, 14 Juni 2021

Peneliti

Harapan Pratama Putra Ndruru
NPM 178330094

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	7
2.1.1. Defenisi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	7
2.1.2. Tujuan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	9
2.1.3. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	10
2.2. Kompetensi Aparat Pemerintahan.....	10
2.2.1. Defenisi Kompetensi Aparat Pemerintahan.....	10
2.2.2. Pentingnya Kompetensi Aparat Pemerintahan	12
2.2.3. Indikator Kompetensi Aparat Pemerintahan	13
2.3. Sistem Pengendalian Internal	14
2.3.1. Defenisi Sistem Pengendalian Internal	14
2.3.2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	16
2.3.3. Tujuan Sistem Pengendalian Internal	18
2.3.4. Indikator Sistem Pengendalian Internal.....	20
2.4. Partisipasi Masyarakat	20
2.4.1. Defenisi Partisipasi Masyarakat	20
2.4.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat	21
2.4.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat	23
2.4.4. Tujuan Partisipasi Masyarakat.....	23
2.4.5. Indikator Partisipasi Masyarakat	24
2.5. Penelitian Terdahulu	24
2.6. Kerangka Konseptual	25
2.7. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	29

3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.1.3. Waktu Penelitian.....	29
3.2. Populasi dan Sampel.....	30
3.2.1. Populasi.....	30
3.2.2. Sampel.....	30
3.3. Defenisi Operasional.....	31
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4.1. Jenis Data.....	32
3.4.2. Sumber Data.....	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6. Teknik Analisis Data.....	33
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif.....	33
3.6.2. Uji Kualitas Data.....	34
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	35
3.6.4. Uji Regresi Linear Berganda.....	37
3.6.5. Uji Hipotesis.....	38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil.....	40
4.1.1. Profil Kecamatan Pancur Batu.....	40
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
4.2. Pembahasan.....	46
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif.....	46
4.2.2. Uji Kualitas Data.....	48
4.2.3. Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.4. Uji Regresi Linear Berganda.....	55
4.2.5. Uji Hipotesis.....	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Defenisi Operasional.....	32
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	42
Tabel 4.2 Pendapat Responden Terhadap Kuesioner Variabel X1	43
Tabel 4.3 Pendapat Responden Terhadap Kuesioner Variabel X2	44
Tabel 4.4 Pendapat Responden Terhadap Kuesioner Variabel X3	45
Tabel 4.5 Pendapat Responden Terhadap Kuesioner Variabel Y	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)	58
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F).....	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Pancur Batu	42
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	51
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	52
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	55



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	70
Lampiran 2 Data Karakteristik Reponden.....	76
Lampiran 3 Hasil Uji Statistika.....	85
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Rohman dkk (2018:191) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan masyarakat. Adapun menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun kemudian, penggunaan dana desa tepat sasaran masih belum sepenuhnya terlaksanakan, masih terdapat banyak penyalahgunaan dana desa yang merugikan desa dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Keuangan RI (2016:19) bahwa masih terdapat penggunaan dana desa diluar prioritas penggunaan, hasil pengadaan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan kelebihan perhitungan volume RAB. Dalam hal ini kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa akan hilang terhadap masyarakat.

Dalam Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2020 (LHP BPKP SUMUT), terdapat penggunaan dana desa tidak sesuai prioritas penggunaan dana desa atas 9 (sembilan) desa di 4 (empat) Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, Laporan BPKP atas audit BLT-

DD yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, diantaranya :

- di peroleh 5 (lima) KK penerima BLT-DD yang tidak tepat sasaran
- terdapat 2 (dua) desa yang mengalokasikan BLT-DD tidak sesuai persentase yang tercantum dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020
- terdapat 4 (empat) desa yang belum mengirimkan Laporan Pelaksanaan bantuan Tidak Terduga dan Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Kepala Daerah.

Tentunya hal ini akan berpengaruh pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang sendiri. Masalah lain terkait dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang sering terjadi adalah keterlembatan waktu dalam pelaporan penggunaan dana desa yang melewati batas (*cut off*).

Sebagaimana pemerintah desa adalah bagian dari entitas pelaporan keuangan bertanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada pemangku kepentingan atas pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa” (Rohman dkk, 2018:279). Menurut Mardiasmo (2018:28) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan alat penilaian kinerja pemerintah. Akuntabilitas yang baik akan menuju pada tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kemampuan menjawab dan bertanggungjawab atas konsekuensi pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah pusat/daerah dan kepada masyarakat. Sebagaimana perwujudan akutabilitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. “Memiliki pemahaman tentang penyajian laporan keuangan desa yang memuat informasi lengkap dan relevan serta ketersediaan secara langsung adalah faktor keberhasilan dalam pengeloaan dana desa” (Arfiansyah, 2020). Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Menurut Cheng dkk (2002) dalam Mualifu, Gospul & Hermawan (2019) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Sehingga pentingnya kompetensi aparat pemerintah desa terkait dengan pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, Kalbers & Forgaty (1995) dalam Widyatama dkk (2017) selain kompetensi, adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas publik. Pengendalian atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah sebagai tolak ukur pengawasan dan dapat mendukung fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Menurut Uddin & Hopper (2001) dalam Widyatama dkk (2017) menambahkan sebuah organisasi harus memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Menurut Crook & Sverrisson dalam Mada dkk (2017) akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai subjek sekaligus objek pembangunan desa partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan didalam PP Nomor 43 Tahun 2014 bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa dari proses pelaksanaan pembangunan hingga pelaporan pelaksanaan pembangunan desa.

Sehingga berdasarkan landasan teori dan isu permasalahan di daerah Kabupaten Deli Serdang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

”Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan didalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kompetensi aparat pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
4. Apakah kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, adapun diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. **Peneliti**, dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang pengaruh kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. **Pemerintahan**, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana desa, dan hal lain yang perlu untuk dibenahi.
3. **Akademis**, penelitian ini dapat menjadi referensi informasi bagi pihak akademis, terutama yang tertarik melakukan penelitian sejenis atau lanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.1. Defenisi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan desa dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya yang ada di desa. Menurut Rohman dkk (2018:191) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, didalam Buku Saku Dana Desa (2018:7) adapun tujuan dana desa diantaranya:

- Meningkatkan pelayanan publik di desa
- Mengentaskan kemiskinan
- Memajukan perekonomian desa
- Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Oleh karena itu, dana desa diperuntukan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus di kelolah dan menuntut pertanggungjawabannya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) akuntabilitas adalah kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Moenek & Suwanda (2019:87) mendefinisikan akuntabilitas sebagai prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan secara terbuka kepada masyarakat.

Selanjutnya Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu, *pertama* pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan *kedua* pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Dari pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan dana desa yang kemudian menjadi alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa dalam mengelolah dana desa. Pengertian diatas relevan dengan pernyataan Arfiansyah (2019) akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaam keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan BPD. Artinya pemangku kepentingan informasi berhak atas laporan pertanggungjawaban untuk melakukan pengawasan, penilain dan evaluasi atas kinerja pemerintah selaku pemegang wewenang dalam mengelolah keuangan desa.

Mengingat pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan, hal ini mendorong beberapa penelitian untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan seperti dana desa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu “kompetensi sumber daya manusia sebagai pemerintah desa, sistem pengendalian internal yang baik, partisipasi masyarakat juga turut meningkatkan akuntabilitas, dan faktor lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi serta budaya organisasi” (Mada dkk, 2017; Widyatama dkk, 2017; Arfiansyah, 2020; Aziiz dkk, 2019; Subroto, 2009).

2.1.2. Tujuan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menurut Moenek & Suwanda (2019:111) dalam penegakan asas akuntabilitas :
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas instansi pemerintahan (pemerintahan

yang baik dan terpercaya). Beberapa sasaran dari terciptanya akuntabilitas instansi pemerintahan, yaitu :

1. Menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisiensi, dan responsif pada aspirasi masyarakat dan lingkungan.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya terjaga dengan baik.

2.1.3. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018:28) terdapat 4 (empat) unsur akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.2. Kompetensi Aparat Pemerintah

2.2.1. Defenisi Kompetensi Aparat Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagaimana merupakan unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa atas kepentingan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat mekanisme atau tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup berbagai aspek, tentu saja akan memerlukan keahlian atau kompetensi dan kapasitas sumber daya yang baik dan memadai. Sehingga beban dan tanggungjawab atas otoritas dari setiap tupoksi jabatan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Kemudian McClelland dalam Kasim (2015) mendefinisikan kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik pribadi, motif, perilaku atau pengetahuan yang terbukti dapat mendorong pekerjaan yang baik. Artinya bahwa kompetensi akan terlihat pada *working performance*, kompetensi yang relevan akan terlihat dari hasil kinerja yang maksimal.

Robbins (2007:38) dalam Widyatama dkk (2017) menyatakan bahwa :

Kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik yaitu : *Pertama* kemampuan intelektual mampuni seseorang untuk berpikir, merencanakan, mengungkapkan dan memahami suatu gagasan, memecahkan suatu masalah, kemampuan berbicara dan sebagainya. *Kedua* kemampuan fisik adalah kemampuan yang menuntut seseorang dalam hal stamina, kesehatan, kekuatan, keterampilan. Kemampuan fisik harus seimbang dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, karena dimana sebuah tanggungjawab yang berat akan membutuhkan kesiapan mental fisik yang mampuni.

Lebih jelas lagi di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 menyatakan kompetensi merupakan kemampuan kerja pada

setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.2.2. Pentingnya Kompetensi Aparat Pemerintah

Menurut Rohman dkk (2018:5) pemerintah desa merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat di desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan : Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dinyatakan pada pasal 23, bahwa pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya Rohman dkk (2018:52) menyebutkan aspek tatakelola pemerintah desa yang meliputi pengelolaan berbagai sumber daya yang dikelolah oleh pemerintah desa minimal diantaranya yaitu :

1. Sumber daya manusia
2. Sumber daya aset
3. Sumber daya keuangan
4. Sumber daya teknologi, dan sumber daya lainnya.

Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawarata Desa (BPD) dan menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Sebagaimana kemudian diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 paragraf 3, yaitu :

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan aparat pemerintah yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik.

Sehingga dalam menjawab semua tuntutan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan, kompetensi dari sumber daya manusia sebagai pemerintah desa sangatlah penting untuk memenuhi tuntutan ini. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar keuangan negara dikelola sesuai dengan asas profesional, tertib, terbuka, bertanggungjawab, ekonomis, efektif dan efisien, dan transparansi.

2.2.3. Indikator Kompetensi Aparat Pemerintah

Menurut Suparyadi (2015:243) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu : *Knowledge*, *Skill* dan *Attitude*.

1. Pengetahuan (*knowledge*), adalah kemampuan yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan mendukung suatu pekerjaan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

2. Keterampilan (*skill*), merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya seseorang yang memiliki keterampilan menggunakan sistem informasi keuangan secara komputerisasi. Selain pengetahuan dan keterampilan, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap (*attitude*).
3. Sikap (*attitude*), merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam organisasi. Sikap yang bersifat mendukung daripada tujuan organisasi akan berpengaruh terhadap tugas yang diberikan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dan mampu bekerja sama dengan memahami motivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok.

2.3. Sistem Pengendalian Internal

2.3.1. Defenisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) didalam Yendrawati (2013) Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pernyataan diatas sejalan dengan defenisi sistem pengendalian yang di keluarkan oleh COSO.

Committe of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) adalah kelompok sektor swasta yang terdiri dari *American Accounting Association (AAA)*, *Institute of Management Accountants (IMA)*, dan *Financial Executives Institute (FEI)* adalah sebuah organisasi yang mendedikasikan diri berfokus mengembangkan teori-teori sistem pengendalian internal yang banyak diterima dan diterapkan oleh organisasi-organisasi besar dalam melindungi aset mereka.

COSO mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang melibatkan dewan komisaris, pihak manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Pelaporan keuangan yang handal
3. Kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku

Dari penjelasan diatas jelas bahwa sistem pengendalian internal dirancang pada suatu organisasi guna melindungi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dari tindakan pencurian dan penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasi. Tindakan seperti ini biasanya didasarkan karena adanya kepentingan pribadi atau kelompok, diluar kepentingan organisasi.

Pernyataan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan sistem pengendalian intern (SPI), yaitu : Sistem pengendalian internal adalah sebagai Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akibat dari semakin luasnya aspek yang mempengaruhi kondisi organisasi yang tidak hanya berasal dari internal organisasi juga dari sisi eksternal, yang kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 COSO menerbitkan *Internal Control Integrated Framework (ICIF)* sebagai revisi dari versi tahun 1992. Menurut COSO (2013:4) dalam *Internal Control-Integrated framework (ICF) An Implementation Guide for the Healthcare Provider Industry (2019)*, komponen pengendalian internal sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian (COSO, 2019:6) lingkungan pengendalian terdiri dari: integritas dan nilai-nilai etika organisasi, bertanggungjawab terhadap pengawasan, Struktur organisasi, wewenang, dan tanggungjawab, menunjukkan komitmen terhadap kompetensi, menegakkan akuntabilitas.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*) yaitu identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas organisasi. Terdapat 4 (empat) prinsip yang mendukung penilaian resiko (COSO, 2019:6) yaitu: menentukan tujuan yang sesuai, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, menilai risiko penipuan, mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*), yaitu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian (COSO, 2019:6) yaitu: memilih dan mengembangkan aktivitas kontrol, memilih dan mengembangkan kendali umum atas teknologi, menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur.
4. Informasi dan komunikasi (*information processing and communication*), informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi (COSO, 2019:6) yaitu: menggunakan informasi yang relevan dan andal, berkomunikasi secara internal, berkomunikasi secara eksternal.
5. Monitoring (*monitoring*), yaitu proses penilaian mutu kinerja sistem pengendalian intern, sepanjang waktu. Terdapat 2 (prinsip) yang mendukung komponen monitoring (COSO, 2019:6), antara lain : melakukan evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan.

2.3.2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan sistem pengendalian internal yaitu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. “Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah” (Widyatama dkk, 2017).

Adapun tujuan dari pemerintah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan jabatannya .
2. Memenuhi tanggungjawab entitas pelaporan dalam menyajikan informasi yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sehingga efektif dan efisien.
4. Menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam pelaksanaan aktivitas keuangan sehingga informasinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagian kesatu pasal 3 (tiga), menyebutkan 5 (lima) unsur pengendalian internal pemerintahan diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian, yakni pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

- d. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - e. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
2. Penilaian risiko, yakni penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut. Dalam penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas dua :
 - a. Identifikasi risiko.
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian, yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa arahan atas suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari fungsi pemerintahan yang bersangkutan tersebut. Kegiatan pengendalian ini terdiri dari :
 - a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d. Penetapan dan riviui atas indikator dana ukuran kinerja.
 - e. Pemisahan fungsi.
 - f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 - g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 - h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 - i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
 - j. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi, yakni harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dengan benar dan tepat waktu sehingga instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pemerintah harus sekurang-kurangnya;
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.
5. Pemantauan adalah kegiatan pengendalian internal untuk pemantauan dalam menilai kinerja dari waktu ke waktu secara berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan riviui lainnya.

2.3.3. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengawasan yang belum optimal terhadap pengelolaan dana desa menimbulkan banyaknya tindakan penyalahgunaan dana desa. Sehingga pemerintah dituntut untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa dengan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf g Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pengawasan ini memiliki arti pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan. Sehingga “pengawasan merupakan hal yang sangat penting, banyak penelitian yang memberikan pendapat tentang fungsi manajemen dan menempatkan fungsi pengawasan sebagai fungsi yang sangat penting” (Rohman, dkk, 2018:401).

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas penyajian LKPD Tahun 2017 dalam Moenek dan Suwanda (2019:8) mengungkapkan bahwa :
 Sebanyak 2.913 temuan yang memuat 12.780 permasalahan yang terdiri dari 6.222 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.558 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Penemuan permasalahan SPI sebanyak 6.222 merupakan hasil pemeriksaan atas 542 LKP pada Tahun 2017. BPK menyimpulkan 3 (tiga) komposisi kelemahan SPI dari permasalahan yang ditemukan dari 542 LKPD tersebut terdiri dari 2.083 merupakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 merupakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.252 dalah permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal.

Sebagaimana akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah kepada publik, perihal diatas akan berdampak buruk pada tingkat akuntabilitas pemerintahan. Sehingga

pengaruh sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya menurut Moenek & Suwanda (2019:9) permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena hal berikut.

1. Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta kurang optimal pengawasan.
2. Pemerintah daerah belum mengidentifikasi kelemahan dan resiko aplikasi serta menyesuaikan kebijakan akuntansi.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja dan pembiayaan.
4. Pejabat berwenang belum optimal melakukan pengawasan atas pendapatan pajak dan retribusi.
5. Belum optimalnya penyusunan SOP pelaksanaan tugas sebagaimana adalah pedoman kerja.
6. Pemerintah daerah belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

2.3.4. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, terdapat 5 unsur komponen SPIP, yang terdiri dari :

1. Lingkungan pengendalian, adanya lingkungan pengendalian yang baik sehingga menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif.
2. Penilaian risiko, mengidentifikasi dan menilai setiap risiko yang dapat menghambat kegiatan.
3. Aktivitas pengendalian, memastikan bahwa arahan atas suatu kegiatan dilaksanakan sesuai pada fungsi pemerintahan yang bersangkutan tersebut.
4. Informasi dan komunikasi, kegiatan mencatat, pemrosesan, pelaporan, dan mengkomunikasikan informasi dengan tepat.
5. Pemantauan pengendalian, upaya pemantauan berkelanjutan dan tindaklanjut dari evaluasi kinerja.

2.4. Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Defenisi Partisipasi Masyarakat

Adapun pengertian partisipasi masyarakat menurut Mardikanto & Soebiato (2019:82), yaitu :

Partisipasi adalah bentuk keterlibatan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*interinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang meliputi pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), dan pemanfaatan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang yang berada pada suatu wilayah yang berbatas, memiliki hukum dan adat istiadat.

Dengan begitu partisipasi masyarakat merupakan wujud dari diakuinya mereka sebagai orang-orang yang hidup dan tinggal didalam wilayah tersebut. Karena para pemerintah pada dasarnya adalah orang yang terpilih dan dipilih masyarakat dan bertanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Cohen and Uphoff (1977) dalam Rosyida dan Nasdian (2011) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan kegiatan karena terkait dengan aspirasi masyarakat.
2. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap inti dari pembangunan dimana masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan serta pengawasan sekaligus. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
3. Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, adalah indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.

2.4.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan saja, tetapi masyarakat

harus terlibat dalam proses pelaksanaan, pengawasan, hingga mendapatkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pengertian masyarakat sendiri di dalam KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Disini dijelaskan bahwa masyarakat itu hidup didalam aturan yang sudah dibiasakan untuk dilakukan, sehingga jika mereka menganggap sesuatu itu tidak sesuai dengan budaya mereka, maka hal itu akan bertolak belakang dengan cara hidup mereka. Artinya sebagai masyarakat, mereka memiliki keinginan-keinginan untuk kualitas hidup yang lebih baik yang kemudian keinginan ini adalah tugas dari pemerintah itu sendiri. Sehingga masyarakat akan melakukan penilaian pada setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan mereka.

Sebagaimana Syaiful (2009) dalam Lambajang, Saerang dan Morasa (2018) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi yaitu menyangkut tentang aspek pengawasan dan aspirasi. Kemudian diteruskan dengan pernyataan Moenek dan Suwanda (2019:78) bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tentu hal ini akan menghambat tujuan dari pembangunan desa yang memberdayakan masyarakatnya sebagai objek sekaligus subjek pembangunan di desa. Kurangnya partisipasi dari masyarakat adalah penyebab munculnya

tindakan penyalahgunaan wewenang karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan terhadap kewenangannya.

2.4.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Dusseldorp (1981) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Mengikuti diri pada setiap kegiatan diskusi-diskusi kelompok yang dilakukan.
3. Melibatkan diri pada setiap kegiatan-kegiatan organisasi di desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dengan menyampaikan aspirasi didalam forum diskusi.
6. Menikmati manfaat dari hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan serta ikut memelihara.

2.4.4. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga dengan adanya “keterlibatan masyarakat akan memperkuat proses kinerja penyelenggaraan pemerintah dan peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran” (Saputro, 2012 dalam Lambajang dkk, 2018).

2.4.5. Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Yadav (UNAPDI 1980) didalam Mardikanto dan Soebiato (2019:82) mengemukakan ada 4 (empat) macam kegiatan yang membuktikan adanya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, diantaranya :

1. Pengambilan keputusan, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan program-program di desa.
2. Pelaksanaan kegiatan, masyarakat sebagai salah satu sumber daya yang ada di desa harus terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sumbangan ini berupa tenaga dan pemikiran.
3. Pemantauan dan evaluasi pemnbangunan, masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangan sebagai alat pengawasan dan evaluasi.
4. Pemanfaatan hasil pembangunan, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil kegiatan pembangunan terkait kualitas hidup.

2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa, dan menjadi bahan masukan dan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Nur Aziiz, dkk (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Faktor-faktor yang meliputi Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan SPI memiliki pengaruh yang positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2	Mufti Arief Arfiansyah (2019)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Sarifudin Mada, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan

		Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4	Arif Widyatama, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).	1. Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. 2. Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.
5	Agus Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan pertanggungjawaban secara fisik, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini dilakukan kembali berdasarkan kajian teori yang kuat dan telah dikumpulkan untuk membentuk sebuah konsep baru dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan variabel yang berbeda dari setiap penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

2.6. Kerangka Konsep Penelitian

“Laporan pertanggungjawaban adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan” (Rohman dkk, 2018:279). Selain pemerintah pusat, masyarakat juga memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui sejauhmana realisasi anggaran dan pelaksanaannya. Sehingga dapat dilihat bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik menunjukkan sistem pemerintahan

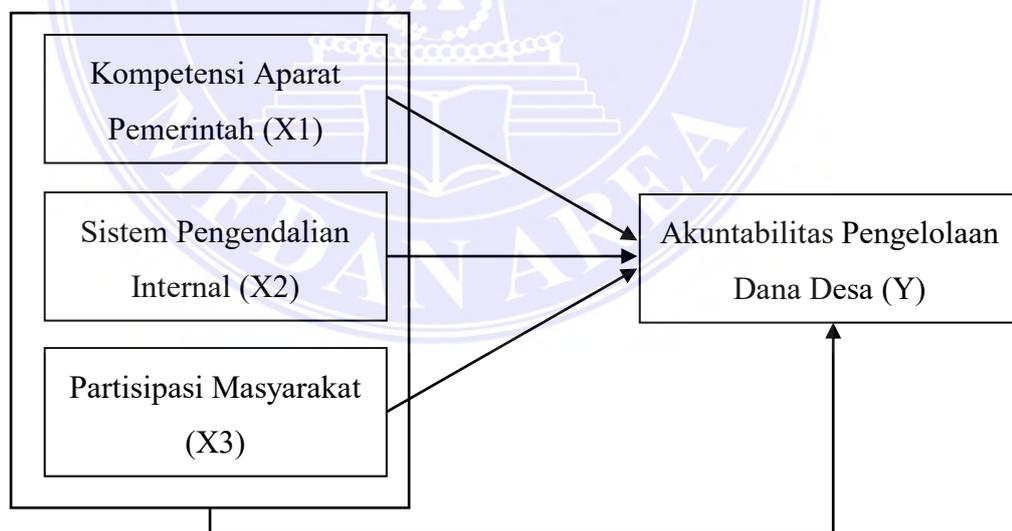
yang baik pula. Adapun beberapa teori yang menyebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diantaranya kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat. Cheng dkk (2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas. Kemudian Suparyadi (2015:243) menyebutkan 3 (tiga) dasar yang menjadi pembentuk kompetensi diantaranya *knowledge*, *skill* dan *attitude*. Artinya dengan pengetahuan dan keahlian bidang yang dimiliki oleh pemerintah desa akan mendukung aparat pemerintah desa dalam memahami tugas dan tanggungjawab dengan baik. Selanjutnya sikap yang baik akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan yang baik.

“Selain kompetensi, adanya sistem pengendalian internal dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas publik” (Kalber & Forgati, 1995). Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW, 2019), mencatat tingkat tindakan korupsi dana desa dari tahun ketahun meningkat. Disebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 96 kasus korupsi dana desa dan 89 kepala desa yang terjerat korupsi dana desa. Menurut ICW sendiri hal ini disebabkan karena kurangnya sistem pengendalian dan pengawasan yang baik. Sehingga dengan adanya bentuk sistem pengendalian internal dan pengawasan yang baik akan mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain pemerintah pusat, masyarakat sebagai bagian dari desa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desanya. Ini merupakan bentuk tanggungjawab atau partisipasi masyarakat desa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa yang baik. Karena “kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat” (Moenek & Suwanda, 2019:78). sehingga “akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat” (Crook & Sverrisson dalam Devas & Grant, 2003:309).

Berdasarkan tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan atas dasar kerangka pemikiran diatas, sehingga dapat dibentuk kerangka konseptual penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian dan disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena “jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris” (Sugiyono, 2019). Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparat pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- H₂ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- H₃ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- H₄ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa seluruh Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli serdang, Kecamatan Pancur Batu memiliki 25 Desa.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2020 sampai April 2021. Target waktu penelitian ini dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Rencana Penelitian

Tahapan Penelitian	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021
Pengajuan Judul	■									
Pencarian Data dan Penyusunan Proposal	■									
Penyerahan dan Bimbingan Proposal	■	■								
Seminar Proposal			■							
Pengambilan dan Pengolahan Data				■	■					
Bimbingan Skripsi					■	■				
Seminar Hasil							■			
Sidang Meja Hijau								■	■	■

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sebagai sumber kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Aparat Pemerintah Desa yang terdapat di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik "*purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu agar diperoleh gambaran

utuh tentang suatu kasus” (Rusiadi dkk, 2017:45). Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu:

- a) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- b) Perangkat yang menyusun dan melaksanakan kebijakan APB Desa.
- c) Perangkat yang mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan pelaksanaan APB Desa.

Penentuan sampel berdasarkan 25 desa yang terdapat pada Kecamatan Pancur Batu, setiap desa terdiri dari 3 (tiga) pemerintahan desa yang memenuhi kriteria, yaitu : Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan. Sehingga sampel yang diperoleh adalah 75 sampel.

3.3. Defenisi Operasional

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
1	Kompetensi Aparat Pemerintah (X1)	Kompetensi Aparat Pemerintah merupakan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan Desa. Kemampuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik sesuai tugas dan fungsi jabatannya	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Likert
2	Sistem Pengendalian Internal (X2)	Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam melindungi aset dan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas Pengendalian dan Komunikasi 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian	Likert
3	Partisipasi Masyarakat (X3)	Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan	1. Pengambilan Keputusan 2. Pelaksanaan Kegiatan	Likert

		pembangunan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pemanfaata hasil dari kegiatan pembangunan tersebut.	3. Pemantauan dan Evaluasi 4. Pemanfaatan Hasil Pembanguna	
4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	bentuk pertanggungjawaban atas laporan penggunaan dana desa yang kemudian menjadi alat evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat atas kinerja pemerintah desa dalam mengelolah dana desa.	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Likert

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang kemudian dinyatakan dengan bilangan atau angka. Data kuantitatif didalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dijawab langsung oleh responden, dimana jawaban responden tersebut dinyatakan dengan bilangan atau angka.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, dimana merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau dari sumber utamanya. Menurut Sugiyono (2019) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner (angket) untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel penelitian kepada responden untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Jawaban dari responden diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden dengan nilai 1 sampai 5.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang telah diperoleh melalui instrumen kuesioner untuk diuji sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kuantitatif regresi linear berganda dengan bantuan Software *IBM SPSS Statistic 20*.

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Lubis dan Osman (2015) dalam Lubis dkk (2017) statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Dalam “statistik deskriptif mencakup gambaran frekuensi data secara umum seperti mean, median, standar deviasi, varian, minimum, maximum dan sebagainya” (Sukoco & Soebandhi, 2013 dalam Lubis dkk, 2017).

3.6.2. Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukannya pengolahan data yang lebih lanjut, perlu dilakukan pengujian instrumen penelitian yang telah diperoleh dari jawaban responden yang dikumpulkan. Uji instrumen penelitian dilakukan untuk memastikan jawaban kuesioner adalah benar-benar valid dan reliabel.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan kebenaran dari data yang akan diolah. Menurut Rusdiadi dkk (2017) validitas adalah suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrument untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi validitas berhubungan dengan tingkat keakurasian dari alat ukur untuk mengukur sesuatu yang diukur. Suliyanto (2018) juga mendefenisikan uji validitas merupakan suatu alat ukur yang dinyatakan dengan valid jika instrumen tersebut “benar-benar” benar untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Menggunakan metode koefisien korelasi pearson dengan kriteria jika r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikan 0,05, maka instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Untuk menguji suatu kekonsistenan dari instrumen pertanyaannya, dapat diuji dengan uji reliabilitas. Zikmund (2003)

dalam Lubis dkk (2017) menyebutkan bahwa uji reliabilitas atau keandalan merupakan suatu cara untuk mengetahui konsistensi dari suatu alat ukur yang akan digunakan, dalam upaya yang berbeda untuk mengukur hal yang sama berkumpul dititik yang sama. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* untuk menentukan tingkat kekonsistenan dari alat ukur yang dipakai, yaitu $> 0,6$. Suatu alat ukur dinyatakan reliabel jika *cronbach alpha* nya $> 0,6$.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data di olah dengan uji regresi, diperlukan uji asumsi klasik terhadap data yang telah dikumpulkan agar hasil yang diperoleh efisien. Uji asumsi klasik yang sering digunakan diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas merupakan pengujian data yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai distribusi normal atau tidak. Sehingga hasil regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal.

Dalam penelitian ini menggunakan metode uji statistika *one sample Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik histogram dan normal P-Plot untuk memperkuat pengujian. Pengambilan keputusan normalitas dengan *one sample Kolmogorov-Smirnov*, adalah berikut:

- Jika $p > 0,05$ maka distribusi data normal
- Jika $p < 0,05$ maka distribusi data tidak normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian data untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi liner berganda. “Korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas akan mengganggu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat” (Saunders dalam Lubis dkk, 2017).

“Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi” (Ghozali, 2013 :105) berikut:

- Jika nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas.
- Jika nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10 maka model regresi bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

“Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain” (Lubis & Osman dalam Lubis dkk, 2017). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana “terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap yang disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas” (Ghozali, 2013).

Untuk melihat heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa uji heteroskedastisitas, salah satu yang sering digunakan adalah metode scatter plot dimana “suatu data dikatakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar dan sebaliknya” (Ghozali, 2013).

3.6.4. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk memodelkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Rumus regresi linear berganda pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Bilangan Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

X1 = Kompetensi Aparat Pemerintah

X2 = Sistem Pengendalian Internal

X3 = Partisipasi Masyarakat

e = error

Pengujian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 5% atau $\alpha=0.05$ dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau 0.95.

3.6.5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial atau uji t bertujuan “untuk mengetahui pengaruh secara individual dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat digunakan uji t” (Ghozali, 2013). Variabel independen secara individual dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila suatu *pvalue* (sig) lebih kecil dari pada tingkat signifikan (α). Tingkat signifikan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti “apabila nilai *pvalue* (sig) lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen” (Ghozali, 2013).

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui kemampuan keseragaman variabel dependen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh semua variabel independen secara bersama. Untuk membuktikan apakah model di dalam penelitian ini layak untuk digunakan dapat dilihat melihat pada Sig-F nya. Signifikan ditentukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau melihat signifikan pada output SPSS. Tingkat signifikan atau α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0.05%.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pada model regresi. Jika “nilai R^2 semakin tinggi mendekati 1 maka semakin kuat model regresi atas keseragaman variabel dependen dijelaskan oleh keseragaman variabel independen, sebaliknya jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas” (Ghozali, 2013).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, diperoleh :

1. Kompetensi aparat pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang.
4. Kompetensi aparat pemerintah, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun beberapan saran penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya, menambah penggunaan sampel dan variabel atau faktor lain yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas, sehingga dapat diperoleh hasil yang akurat dan mampu diaktualisasikan di lingkungan pemerintahan desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi pemerintahan, memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagaimana menjadi alat evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, Mufti Arief. 2020. *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. 3(01):68-82.
- Aziiz ,Muhammad Nur dan Prastiti, Sawitri Dwi. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 6(2):280-344.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara (BPKP SUMUT) 2020. *Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2019*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2019. ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat. CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>. diakses jam 1.40pm.tanggal 4/12/2019.
- Kasim, Y, Erlynda. 2015. *Effect Of Government Accountants Competency And Implementation Of Internal Control To The Quality Of Government Financial Reporting*. *International Journal of Business, Economics and Law*. 8 (01): 97-105.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Buku Saku Dana*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2019).
- Kementerian Keuangan. 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta .Redtop Hotel and Convention Center. 21-24 November 2016.
- Lambanjang, A, Amelia., Saerang, P,P, David. dan Morasa, J. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. 9(01):104-117.
- Mada,Sarifudin, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas*

Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal riset akuntansi dan auditing. 8(2):106-115.

- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Mardikanto, totok. dan Soebiato, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabet.
- Moenek, Reydonnyzar dan Suwanda, Dadang.. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mualifu., Ahmad Gospul., dan Hermawan. 2019. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*. Journal of Economic, Business and Engineering. 1(1):49-59.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)*.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP)*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang *Pedoman Tatacara Pengawasan ats Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Keuangan Desa*.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil*.
- Rohman, Abdul., Ika Sasti Ferina & Ermadiana. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rosyida, Isma dan Nasdian, Tonny Fredian. 2011. *Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program corporate social responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas pedesaan*. Jurnal sosiologi pedesaan. 5(01):50-70.

- Rusdiadi., Suabiantoro, Nur dan Hidayat, Rahmat. 2017. *Metodologi Penelitian (Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel)*. Medan. USU Press.
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal riset akuntansi "goodwilli". 8(2):106-115.
- Schandl, A. 2019. *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Tahun 2008).
- Suparyadi, H. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabet.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Widyatama, Lola Novita dan Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 2(2): 1-20.
- Yendrawati R. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI).17 (2):166-175.
- Lubis, Zulkarnain, Sutrisno dan Andre Hasudungan Lubis. 2017. *Panduan Praktis Praktikum SPSS*. Pusat Komputer Universitas Medan Area. Medan.



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i Pemerintah Desa

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harapan Pratama Puta Ndruru
NPM : 178330094
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun akademis dan pemerintah desa. Oleh karena itu, mohon kesediannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini sesuai dengan sejujurnya. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan, dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap dijaga. Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2020

Hormat Saya,

HARAPAN PRATAMA PUTRA NDRURU
NPM 178330094

Identitas Responden

1. Nama :(boleh tidak di isi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA/SMK
 D3 S1 S2
Lain-lain
5. Jabatan : Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Kepala Urusan Keuangan
6. Nama Desa :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling mendekati pendapatan anda

- Penilaian** : SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral/Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Sumber-sumber penggunaan dana pada Pemdes telah diketahui oleh pemangku kepentingan selaku pengguna laporan keuangan					
2	Penyusunan anggaran Pemdes dilakukan sesuai prinsip-prinsip penganggaran					
3	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien					
4	Pemdes telah memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi dalam mengelola keuangan desa					
5	Pemdes telah melaksanakan prosedur administrasi dalam mengelola keuangan desa					
6	Selalu ada pengawasan terhadap kegiatan/program Pemdes					
7	Pelaporan hasil kegiatan/program kerja Pemdes disusun secara tepat waktu					
8	Pemdes telah memiliki kesesuaian antara target dengan pencapaian kegiatan/program yang dilakukan					
9	Pemdes telah menjalankan kebijakan ke dalam sasaran yang harus dicapai					
10	Pemdes memiliki sasaran dan tujuan yang jelas dari kebijakan yang telah dibuat					
11	Kebijakan yang dibuat oleh Pemdes dikembangkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik					

KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH DESA

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang dilakukan dengan baik					
2	Saya selalu aktif mencari informasi terkait dengan tugas dan fungsi pekerjaan dari berbagai sumber (orang lain, literatur/buku)					
3	Saya pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan tugas, pokok, dan					

	fungsi pekerjaan					
4	Saya mampu menguasai fasilitas kerja (komputer, dan lain-lain) yang diberikan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan					
5	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan					
6	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum					

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan kode etik secara tertulis.					
2	Pimpinan Instansi/lembaga di tempat Saya bekerja telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik					
3	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi.					
4	Instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap Resiko.					
5	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat Saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					
6	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai					
7	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab					
8	Instansi/lembaga tempat Saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit					
9	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					

PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa.					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa.					
3	Masyarakat desa membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tandingan) terhadap Rancangan anggaran desa yang diajukan oleh Kepala desa dan/atau BPD					
4	Masyarakat desa terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa					
5	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
6	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					
7	Masyarakat desa memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa					
8	Masyarakat desa memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksanaan anggaran desa					

Lampiran 2. Data Responden

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	47	62,7	62,7	62,7
Valid Perempuan	28	37,3	37,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Usia <=30	16	21,3	21,3	21,3
Usia 31-40	20	26,7	26,7	48,0
Valid Usia 41-50	29	38,7	38,7	86,7
Usia >=51	10	13,3	13,3	100,0
Total	75	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMP	1	1,3	1,3	1,3
SMA/SMK	46	61,3	61,3	62,7
Valid D-3	8	10,7	10,7	73,3
S-1	20	26,7	26,7	100,0
Total	75	100,0	100,0	

KOMPETENSI APARAT PEMERINTAH							
NO	XP1	XP2	XP3	XP4	XP5	XP6	TOTAL X1
1	4	4	4	4	4	4	24
2	5	4	4	5	3	4	25
3	4	4	4	4	3	4	23
4	4	4	4	5	4	4	25
5	4	4	4	5	4	4	25
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	3	4	5	4	4	24
8	4	4	4	5	5	5	27
9	5	4	4	5	4	4	26
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	4	5	4	4	4	26
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	4	4	5	5	28
15	5	4	5	5	5	4	28
16	4	4	3	5	4	4	24
17	4	4	3	4	4	4	23
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	4	3	4	5	5	26
26	5	5	5	5	5	5	30
27	4	3	4	4	4	4	23
28	5	5	3	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	5	5	5	5	4	28
31	5	4	4	3	4	4	24
32	4	5	3	4	4	4	24
33	4	4	5	4	4	4	25
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	4	4	4	4	4	24

39	4	5	4	5	4	4	26
40	4	5	5	5	4	4	27
41	4	5	4	4	4	4	25
42	5	4	5	5	4	4	27
43	4	4	5	4	5	4	26
44	5	4	3	4	4	4	24
45	4	4	3	4	4	5	24
46	5	5	5	4	4	4	27
47	4	4	3	4	5	5	25
48	4	4	3	5	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	5	4	4	4	25
51	4	4	4	4	5	4	25
52	4	4	4	4	3	4	23
53	4	4	4	4	3	4	23
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	3	4	3	4	22
58	4	4	3	3	4	4	22
59	4	4	4	4	3	4	23
60	4	4	3	5	5	5	26
61	5	5	4	4	5	5	28
62	5	5	3	5	4	4	26
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	5	5	26
65	5	5	4	4	4	4	26
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	5	5	5	30
69	4	4	4	5	5	5	27
70	4	4	5	4	4	4	25
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	5	4	4	4	25
73	4	4	4	4	4	4	24
74	5	5	5	5	5	5	30
75	5	5	5	5	5	5	30

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL										
NO	YP1	YP2	YP3	YP4	YP5	YP6	YP7	YP8	YP9	TOTAL Y
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34
3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	33
4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	39
5	4	5	5	5	5	3	4	4	4	39
6	4	4	4	5	3	4	5	4	3	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	5	5	4	5	4	5	3	4	4	39
10	4	4	4	3	4	3	3	4	4	33
11	3	4	4	3	4	5	3	4	4	34
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
16	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
17	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
18	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	5	5	4	5	4	3	4	4	4	38
26	5	5	5	4	4	3	4	4	3	37
27	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38
28	4	4	3	4	4	3	3	4	4	33
29	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38
30	5	5	4	5	5	4	5	5	4	42
31	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
32	5	5	4	4	3	4	3	4	4	36
33	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
38	4	4	4	5	5	5	4	4	5	40
39	5	5	4	4	4	3	4	5	4	38

40	4	4	4	3	4	4	4	5	5	37
41	5	4	4	4	4	3	3	4	4	35
42	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
44	5	5	4	4	4	3	4	5	5	39
45	5	5	4	4	4	3	3	4	4	36
46	4	4	4	4	5	5	4	3	3	36
47	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39
48	4	4	4	3	4	4	3	4	4	34
49	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39
50	4	4	4	3	4	5	5	4	4	37
51	5	5	4	4	4	5	4	5	5	41
52	5	5	3	4	4	3	5	5	4	38
53	4	4	3	3	4	5	4	4	3	34
54	4	4	4	4	3	4	4	4	5	36
55	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
56	5	4	5	4	4	5	5	5	5	42
57	4	4	3	5	3	3	4	4	5	35
58	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
59	5	5	5	4	3	4	4	4	4	38
60	5	5	3	4	4	5	5	5	5	41
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
63	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
64	5	5	4	5	4	5	5	5	5	43
65	4	4	3	4	4	5	4	3	4	35
66	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
67	4	4	4	5	5	3	4	3	3	35
68	3	4	4	3	3	4	4	4	4	33
69	5	5	5	3	4	4	3	4	3	36
70	5	5	5	5	4	3	4	4	4	39
71	5	5	5	4	4	4	4	4	3	38
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	4	4	4	4	5	5	5	4	3	38
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

PARTISIPASI MASYARAKAT									
NO	YP1	YP2	YP3	YP4	YP5	YP6	YP7	YP8	TOTAL Y
1	5	4	4	4	4	4	4	4	33
2	4	4	3	4	4	4	3	3	29
3	4	4	3	5	4	3	3	3	29
4	4	4	4	4	4	4	3	3	30
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	5	5	5	4	3	4	3	33
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	4	5	5	4	4	4	4	4	34
9	5	5	4	4	4	3	4	3	32
10	4	4	3	4	4	4	4	3	30
11	4	4	3	4	4	3	4	3	29
12	4	5	4	4	4	4	4	3	32
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	3	5	2	4	5	4	4	4	31
17	4	4	3	4	4	4	4	4	31
18	4	4	3	4	5	4	4	4	32
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	3	4	4	5	4	4	3	4	31
26	3	4	4	4	4	4	4	5	32
27	4	5	4	5	4	4	5	5	36
28	4	4	3	4	4	3	5	4	31
29	4	4	4	4	4	5	4	4	33
30	5	5	5	5	5	4	5	5	39
31	4	4	4	4	3	3	4	3	29
32	5	4	3	3	4	4	4	4	31
33	5	5	1	3	4	4	3	3	28
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	5	5	4	5	5	5	4	4	37

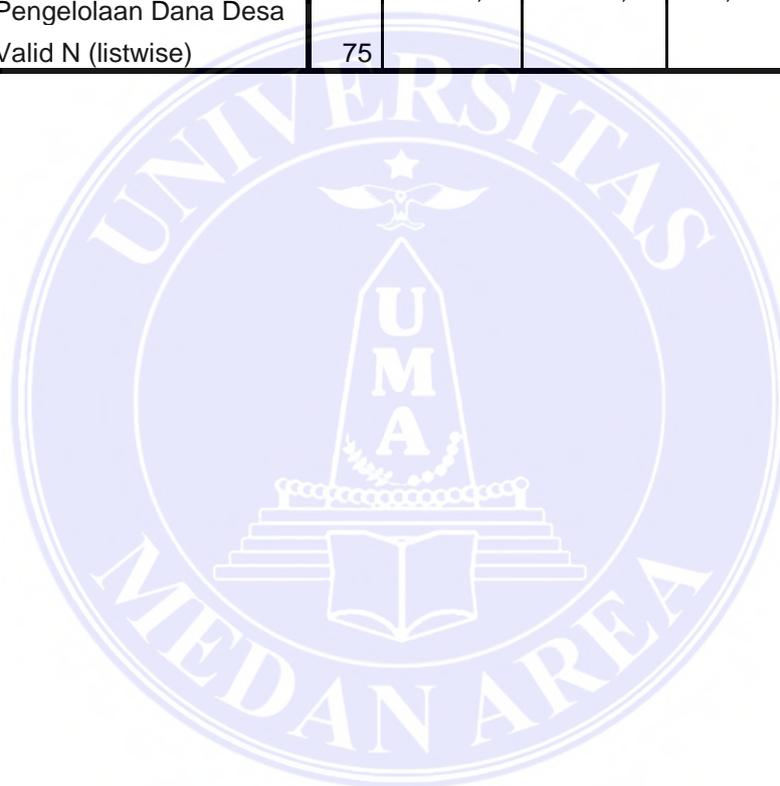
40	4	4	5	5	4	4	5	5	36
41	4	4	4	3	4	3	4	4	30
42	4	5	5	5	4	4	5	5	37
43	4	4	5	5	4	3	4	5	34
44	4	5	5	4	4	5	4	4	35
45	5	4	3	4	5	4	4	4	33
46	4	4	4	3	4	3	4	4	30
47	4	4	3	4	5	4	4	4	32
48	4	4	4	3	5	3	4	4	31
49	4	5	4	4	4	5	4	4	34
50	5	5	4	4	4	3	4	4	33
51	5	5	5	5	5	5	4	4	38
52	4	4	3	4	4	4	4	4	31
53	4	4	3	4	4	4	4	4	31
54	4	4	3	4	4	4	4	4	31
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	3	4	4	4	3	3	4	4	29
57	4	4	2	3	4	4	4	4	29
58	4	4	4	4	4	4	4	4	32
59	4	4	4	4	4	4	4	4	32
60	5	5	5	4	4	4	4	3	34
61	5	4	3	3	4	4	3	3	29
62	5	4	4	4	4	4	4	3	32
63	4	4	3	4	4	3	4	4	30
64	4	4	4	5	5	4	4	4	34
65	4	5	4	4	4	4	4	5	34
66	4	4	5	5	5	4	4	4	35
67	4	4	4	4	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	4	4	4	4	32
69	3	4	3	4	4	3	4	4	29
70	4	4	4	4	4	4	4	4	32
71	4	4	3	3	4	4	4	3	29
72	5	5	5	5	5	5	4	4	38
73	4	4	3	4	4	4	5	4	32
74	4	4	3	4	3	4	4	4	30
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Y)												
N O	YP 1	YP 2	YP 3	YP 4	YP 5	YP 6	YP 7	YP 8	YP 9	YP1 0	YP1 1	TOTAL Y
1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
2	4	5	3	3	4	4	3	4	4	4	4	42
3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	43
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	46
5	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	47
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
8	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	44
9	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	49
10	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	3	44
11	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43
12	4	4	3	4	4	4	3	3	5	5	5	44
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
16	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	52
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
25	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41
26	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	44
27	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44
28	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	47
29	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5	5	45
30	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	48
31	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	47
32	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	43
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
36	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	46
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	54

39	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	53
40	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	53
41	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	43
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
43	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	48
44	5	5	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	48
45	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	3	49
46	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	46
47	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	45
48	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	49
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
50	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	44
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
55	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	42
56	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	47
57	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	4	4	47
58	4	5	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	44
59	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46
60	5	5	3	5	4	4	4	3	4	4	4	5	46
61	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	51
62	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	48
63	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	51
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
65	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	51
66	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	46
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
70	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	47
71	4	4	3	4	4	4	5	5	3	4	4	4	44
72	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
74	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55

Lampiran 3. Hasil Uji Statistika

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparat Pemerintah	75	22,00	30,00	25,3867	2,17413
Sistem Pengendalian Internal	75	31,00	45,00	37,1733	3,08603
Partisipasi Masyarakat	75	28,00	40,00	32,9600	3,33467
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	75	41,00	55,00	47,0933	4,23682
Valid N (listwise)	75				



A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Variabel Kompetensi Aparat pemerintah (Variabel X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	6

Correlations

	Pert. X1_1	Pert. X1_2	Pert. X1_3	Pert. X1_4	Pert. X1_5	Pert. X1_6	Mean_X1
Pert. X1_1 Pearson Correlation	1	,565**	,302**	,333**	,378**	,439**	,698**
Pert. X1_1 Sig. (1-tailed)		,000	,004	,002	,000	,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75
Pert. X1_2 Pearson Correlation	,565**	1	,306**	,345**	,408**	,430**	,713**
Pert. X1_2 Sig. (1-tailed)	,000		,004	,001	,000	,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75
Pert. X1_3 Pearson Correlation	,302**	,306**	1	,309**	,309**	,158	,623**
Pert. X1_3 Sig. (1-tailed)	,004	,004		,003	,004	,088	,000
N	75	75	75	75	75	75	75
Pert. X1_4 Pearson Correlation	,333**	,345**	,309**	1	,384**	,392**	,660**
Pert. X1_4 Sig. (1-tailed)	,002	,001	,003		,000	,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75
Pert. X1_5 Pearson Correlation	,378**	,408**	,309**	,384**	1	,740**	,766**
Pert. X1_5 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,004	,000		,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75
Pert. X1_6 Pearson Correlation	,439**	,430**	,158	,392**	,740**	1	,723**
Pert. X1_6 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,088	,000	,000		,000
N	75	75	75	75	75	75	75
Mean_X1 Pearson Correlation	,698**	,713**	,623**	,660**	,766**	,723**	1
Mean_X1 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	

N	75	75	75	75	75	75	75
---	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

2) Variabel Sistem Pengendalian Internal (Varibel X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.774	9

Correlations

	Pert. X2_1	Pert. X2_2	Pert. X2_3	Pert. X2_4	Pert. X2_5	Pert. X2_6	Pert. X2_7	Pert. X2_8	Pert. X2_9	Mean_X2
Pert.X2_1 Pearson Correlation	1	,779**	,265	,358**	,124	-,021	,188	,456**	,202	,571**
Pert.X2_1 Sig. (1-tailed)		,000	,011	,001	,144	,430	,054	,000	,041	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_2 Pearson Correlation	,779**	1	,411**	,368**	,219	,015	,193	,505**	,200	,633**
Pert.X2_2 Sig. (1-tailed)	,000		,000	,001	,029	,450	,049	,000	,043	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_3 Pearson Correlation	,265	,411**	1	,274**	,305**	,094	,144	,210	,092	,504**
Pert.X2_3 Sig. (1-tailed)	,011	,000		,009	,004	,211	,110	,036	,216	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_4 Pearson Correlation	,358**	,368**	,274**	1	,393**	,087	,382**	,168	,238	,610**
Pert.X2_4 Sig. (1-tailed)	,001	,001	,009		,000	,229	,000	,074	,020	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_5 Pearson Correlation	,124	,219	,305**	,393**	1	,331**	,381**	,239	,143	,593**
Pert.X2_5 Sig. (1-tailed)	,144	,029	,004	,000		,002	,000	,020	,110	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_6 Pearson Correlation	-,021	,015	,094	,087	,331**	1	,448**	,256	,292	,507**
Pert.X2_6 Sig. (1-tailed)	,430	,450	,211	,229	,002		,000	,013	,006	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_7 Pearson Correlation	,188	,193	,144	,382**	,381**	,448**	1	,556**	,373	,694**

	Sig. (1-tailed)	,054	,049	,110	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_8	Pearson Correlation	,456**	,505**	,210*	,168	,239*	,256*	,556**	1	,684**	,729**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,036	,074	,020	,013	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X2_9	Pearson Correlation	,202*	,200*	,092	,238*	,143	,292**	,373**	,684**	1	,596**
	Sig. (1-tailed)	,041	,043	,216	,020	,110	,006	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Mean_X2	Pearson Correlation	,571**	,633**	,504**	,610**	,593**	,507**	,694**	,729**	,596**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

3) Variabel Partisipasi Masyarakat (Variabel X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.844	8

Correlations

	Pert. X3_1	Pert. X3_2	Pert. X3_3	Pert. X3_4	Pert. X3_5	Pert. X3_6	Pert. X3_7	Pert. X3_8	Mean_X3
Pert. X3_1	1	,498**	,300**	,213**	,468**	,437**	,303**	,109**	,569**
	Sig. (1-tailed)	,000	,005	,033	,000	,000	,004	,176	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X3_2	Pearson Correlation	,498**	1	,443**	,458**	,436**	,463**	,411**	,303**
	Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,004	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X3_3	Pearson Correlation	,300**	,443**	1	,635**	,299**	,359**	,488**	,481**
	Sig. (1-tailed)	,005	,000		,000	,005	,001	,000	,000

N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert..X3_4 Pearson Correlation	,213 ^{**}	,458 ^{**}	,635 ^{**}	1	,459 ^{**}	,402 ^{**}	,469 ^{**}	,497 ^{**}	,752 ^{**}
Pert..X3_4 Sig. (1-tailed)	,033	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X3_5 Pearson Correlation	,468 ^{**}	,436 ^{**}	,299 ^{**}	,459 ^{**}	1	,526 ^{**}	,387 ^{**}	,422 ^{**}	,684 ^{**}
Pert.X3_5 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,005	,000		,000	,000	,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X3_6 Pearson Correlation	,437 ^{**}	,463 ^{**}	,359 ^{**}	,402 ^{**}	,526 ^{**}	1	,346 ^{**}	,421 ^{**}	,698 ^{**}
Pert.X3_6 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000		,001	,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert.X3_7 Pearson Correlation	,303 ^{**}	,411 ^{**}	,488 ^{**}	,469 ^{**}	,387 ^{**}	,346 ^{**}	1	,717 ^{**}	,728 ^{**}
Pert.X3_7 Sig. (1-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	,001		,000	,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. X3_8 Pearson Correlation	,109	,303 ^{**}	,481 ^{**}	,497 ^{**}	,422 ^{**}	,421 ^{**}	,717 ^{**}	1	,712 ^{**}
Pert. X3_8 Sig. (1-tailed)	,176	,004	,000	,000	,000	,000	,000		,000
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Mean_X3 Pearson Correlation	,569 ^{**}	,692 ^{**}	,760 ^{**}	,752 ^{**}	,684 ^{**}	,698 ^{**}	,728 ^{**}	,712 ^{**}	1
Mean_X3 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

4) Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Variabel Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	11

Correlations

	Pert. Y1_1	Pert. Y1_2	Pert. Y1_3	Pert. Y1_4	Pert. Y1_5	Pert. Y1_6	Pert. Y1_7	Pert. Y1_8	Pert. Y1_9	Pert. Y1_10	Pert. Y1_11	Mean_Y
Pert. Y1_1 Pearson Correlation	1	,767**	,581**	,604**	,448**	,468**	,514**	,454**	,504**	,580**	,279**	,791**
Pert. Y1_1 Sig. (1-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,008
Pert. Y1_1 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_2 Pearson Correlation	,767**	1	,572**	,450**	,331**	,390**	,340**	,393**	,389**	,548**	,315**	,701**
Pert. Y1_2 Sig. (1-tailed)	,000		,000	,000	,002	,000	,001	,000	,000	,000	,003	,000
Pert. Y1_2 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_3 Pearson Correlation	,581**	,572**	1	,428**	,462**	,411**	,460**	,537**	,493**	,358**	,221*	,724**
Pert. Y1_3 Sig. (1-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,029	,000
Pert. Y1_3 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_4 Pearson Correlation	,604**	,450**	,428**	1	,575**	,507**	,568**	,371**	,327**	,453**	,331**	,724**
Pert. Y1_4 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,001	,002	,000	,002	,000
Pert. Y1_4 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_5 Pearson Correlation	,448**	,331**	,462**	,575**	1	,623**	,443**	,285**	,483**	,507**	,320**	,694**
Pert. Y1_5 Sig. (1-tailed)	,000	,002	,000	,000		,000	,000	,007	,000	,000	,003	,000
Pert. Y1_5 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_6 Pearson Correlation	,468**	,390**	,411**	,507**	,623**	1	,685**	,503**	,405**	,525**	,339**	,753**
Pert. Y1_6 Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,000
Pert. Y1_6 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_7 Pearson Correlation	,514**	,340**	,460**	,568**	,443**	,685**	1	,670**	,349**	,378**	,124	,729**
Pert. Y1_7 Sig. (1-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,000	,144	,000
Pert. Y1_7 N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pert. Y1_8 Pearson Correlation	,454**	,393**	,537**	,371**	,285**	,503**	,670**	1	,482**	,366**	,084	,685**

Pert. Y1_9	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,001	,007	,000	,000	,000	,000	,001	,236	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Pearson Correlation	,504**	,389**	,493**	,327**	,483**	,405**	,349**	,482**	1	,672**	,460**	,709**
Pert. Y1_10	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Pearson Correlation	,580**	,548**	,358**	,453**	,507**	,525**	,378**	,366**	,672**	1	,526**	,744**
Pert. Y1_11	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Pearson Correlation	,279**	,315**	,221*	,331**	,320**	,339**	,124	,084	,460**	,526**	1	,506**
Mean_Y	Sig. (1-tailed)	,008	,003	,029	,002	,003	,001	,144	,236	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Pearson Correlation	,791**	,701**	,724**	,724**	,694**	,753**	,729**	,685**	,709**	,744**	,506**	1
Mean_Y	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

B. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.345	.31176

a. Predictors: (Constant), Mean Variabel X3, Mean Variabel X1, Mean Variabel X2

b. Dependent Variable: Mean Variabel Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.077	3	1.359	13.984	.000 ^b
	Residual	6.901	71	.097		
	Total	10.978	74			

a. Dependent Variable: Mean Variabel Y

b. Predictors: (Constant), Mean Variabel X3, Mean Variabel X1, Mean Variabel X2

Coefficients^a

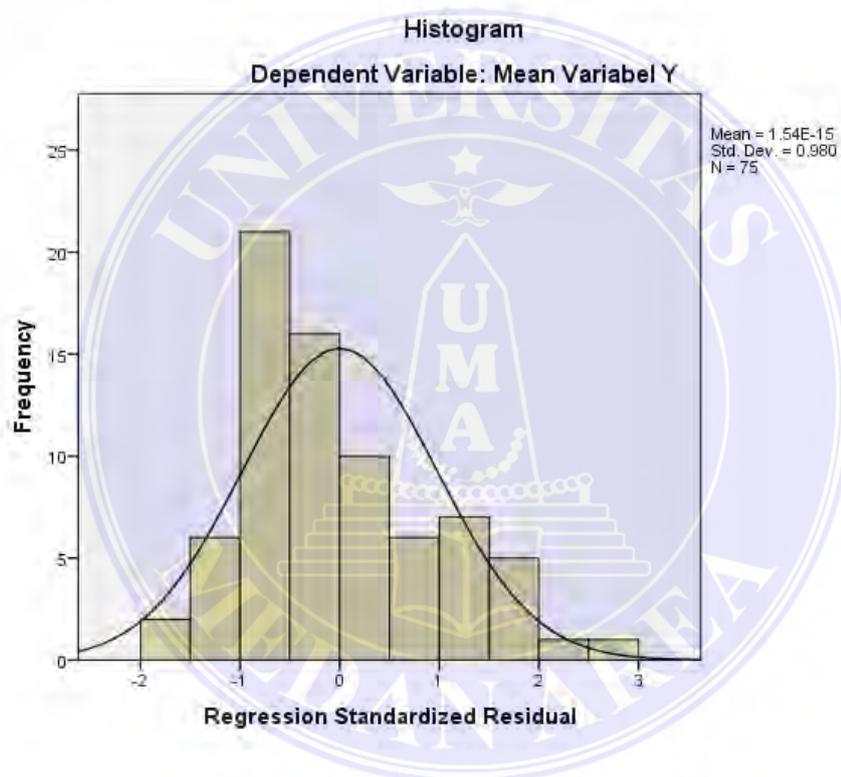
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.143	.540	.2117	.038		
	Mean Variabel X1	.079	.107	.075	.743	.879	1.138
	Mean Variabel X2	.413	.129	.368	3.198	.670	1.492
	Mean Variabel X3	.266	.106	.288	2.513	.673	1.486

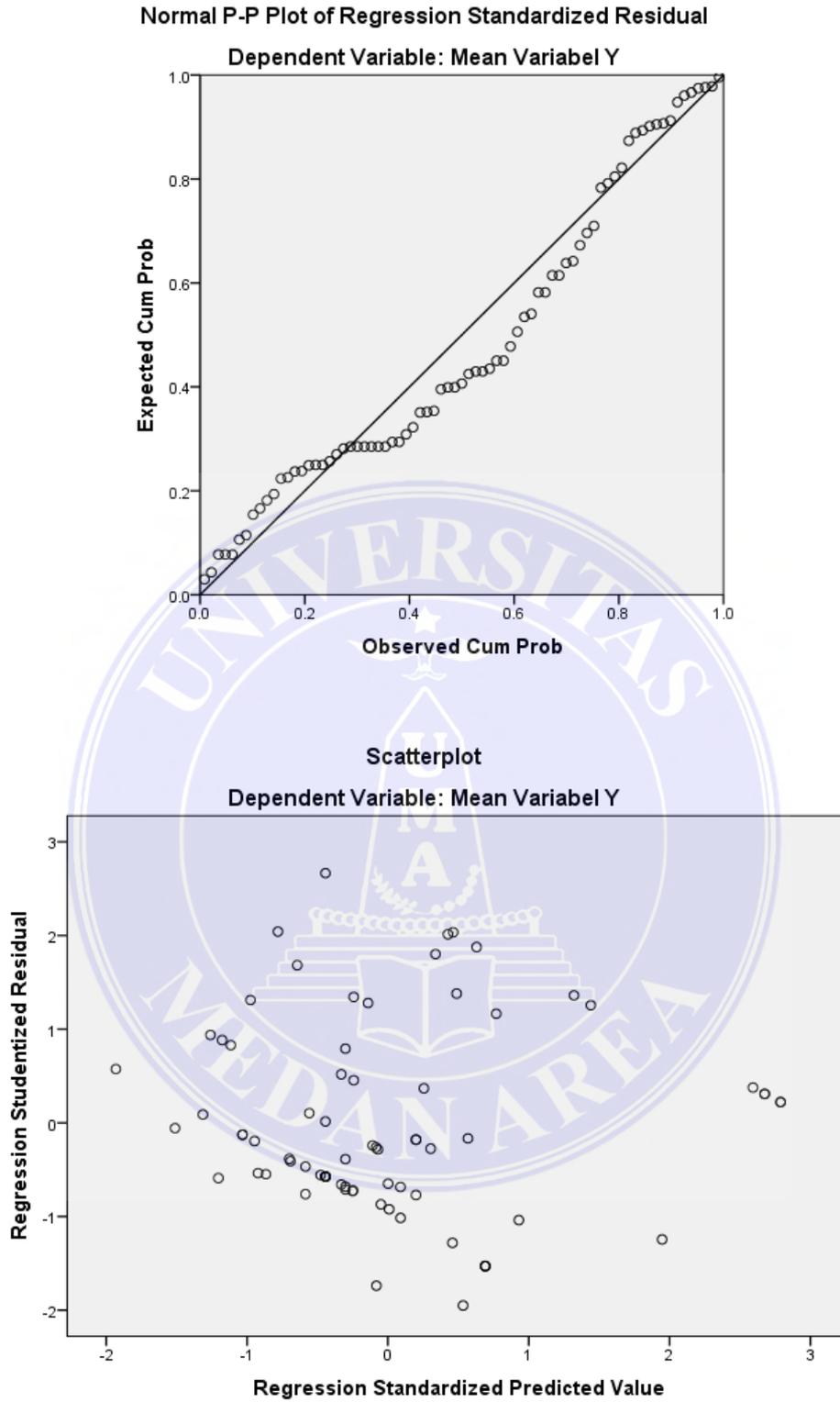
a. Dependent Variable: Mean Variabel Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalu e	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Mean Variabel X1	Mean Variabel X2	Mean Variabel X3
1	1	3.987	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.006	24.787	.05	.39	.04	.49
	3	.004	31.908	.23	.43	.35	.39
	4	.003	36.995	.72	.18	.61	.12

a. Dependent Variable: Mean Variabel Y



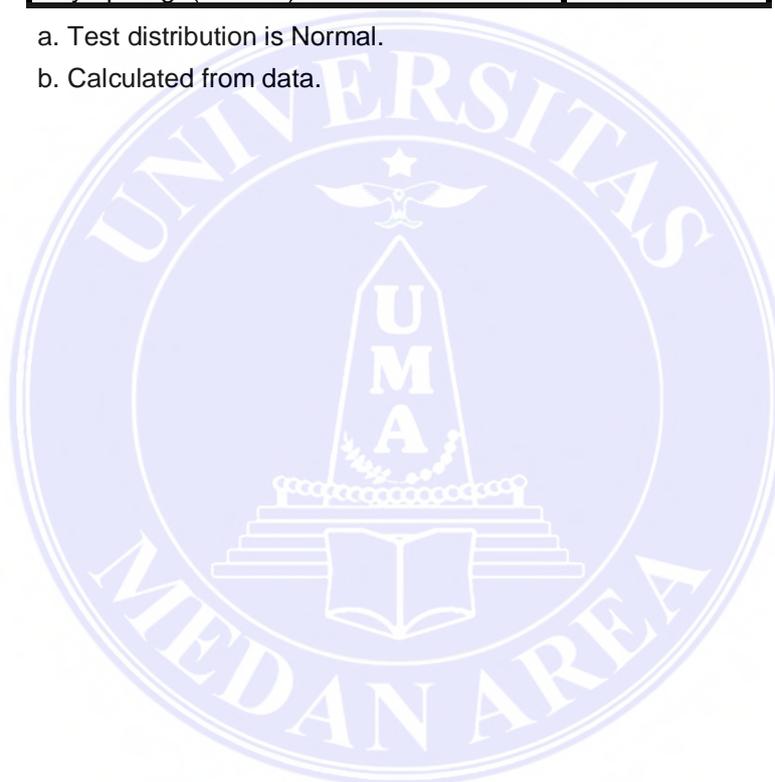


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.30537109
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.137
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.189
Asymp. Sig. (1-tailed)		.118

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366998
 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/II. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas:ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 150/FEB.2/01.1/XI/2020
 Lamp. :
 Perihal : **Izin Magang / Survey**

12 November 2020

Kepada, Yth Pimpinan
 Kecamatan Pancur Batu
 Kab. Deli Serdang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : HARAPAN PRATAMA PUTRA NDRURU
 N P M : 178330094
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul : Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk diberi izin Magang / Survey di Instansi yang Saudara pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahu Magang / Survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Akademik



Teddy Priyadi, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PANCUR BATU**

Jl. Letjend. Djamin Ginting No. 109 Kode Pos. 20353
E-mail : kecpancurbatu@deliserdangkab.go.id
Website : www.kecpancurbatudeliserdangkab.go.id

Nomor : 900 /1435
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Izin Magang/Survey

Pancur Batu, 18 Desember 2020
Kepada Yth :
Wakil Dekan Bid. Akademik

Di -
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara, Nomor 1530FEB.2/01.1/XI/2020, tanggal 12
Nopember 2020 Perihal Izin Magang/Survey.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : Harapan Pratama Putra Ndruru
NPM : 178330094
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah, Sistem
Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Telah selesai melaksanakan Survey sesuai dengan judul Skripsi diatas dari tanggal
12 Nopember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

CAMAT PANCUR BATU

SANDRA DEWI SITUMORANG, S.STP, M.Si
PEMBINA T.K.I
NIP. 197809221997112002

Tembusan :
1. Pertinggal